

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Hamid Aamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, halaman. 219 diakses pada pukul 14.00 Wib tanggal 18 Februari 2018
- Abraham Utama, *Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh*, Opini, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, tt
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Anonimus, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997
- , *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992
- , *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman. 97.
- H aw. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Jurgen Habermas, *The Theory of Communication Action*, Jilid I, Boston, 1984.
- Kertas kerja Elsam, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai salah satu Agenda Hak Asasi Manusia di Aceh*, Jakarta, 2013
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002

- M. Busrizalti, M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media*, Yogyakarta, 2013
- Maria Farida Indra S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012
- Priscilla B. Hayner, *Kebenaran*, Elsam, Jakarta, 2005
- Pricilla B. Hayner, *Kebenaran Tak Terbahasakan Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan*, Jakarta: ELSAM, 2005
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham Ull, 2010
- Sarundang, *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2000
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Polik Di Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI, 2008  
Priscilla Hayner, Fieen Truth Commissions--1974 to 1994: A Comparave Study, *Human Rights Quarterly*, Vol. 16, No. 4, November, 1994
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006

Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

## C. Internet, Majalah dan Lain-lain

“KKR Aceh di Tengah Hempasan Badai”, <http://www.acehtrend.co/kkr-aceh-di-tengah-hempasan-badai/>, diakses pada Pukul 14.15 Wib tanggal 5 Desember 2017

“KKR Aceh di Tengah Hempasan Badai”, <http://www.acehtrend.co/kkr-aceh-di-tengah-hempasanbadai/>, diakses pada pukul 21.00 Wib tanggal 20 Februari 2018

Lihat penjelasan Tina Rosenberg mengenai keadaan Argentina, catatan penutup dalam Martin Meredith, op. cit. halaman. 329: “...*Besides trying the top junta members, Argentina sought to prosecute lower-ranking military officers responsible for crimes. But when the military began to grumble in a country that had already seen eleven military coups in this century, President Raul Alfonsin blinked. He proposed a law setting a date for an end to indictments, and another law that gave amnesty to middle and junior officers on the grounds that they were following orders.*” Lihat juga, antara lain, artikel Diane Orentlicher: “*Setting Accounts: The duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime*” in *100 Yale, Law Journal*, 1991. diakses pada pukul 13.15 Wib tanggal 21 Februari 2018

Andrey Sujatmoko, sejarah, teori, prinsip dan kontroversi HAM, <https://www.scribd.com/doc/40392148/Sejarah-Teori-Prinsip-Dan-Kontroversi-Ham-1>, diunduh pada pukul 02.45 Wib tanggal 16 Februari 2018

Aryos Nivada, Kontestasi Politik KKR Aceh, <http://www.jsithopi.org/2014/01/kontestasi-politik-kkraceh/>, diakses pada pukul 21.00 Wib tanggal 20 Februari 2018

BBC Indonesia, “Kemendagri Pertanyakan KKR Aceh”, [hp://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/12-/131227\\_kemendagri\\_pertanyakan\\_kkr\\_aceh](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12-/131227_kemendagri_pertanyakan_kkr_aceh), diakses pada Pukul 13.55 Wib tanggal 28 Oktober 2017.

BPHN, Tiga Dekade Prolegnas Dan Peran BPHN, Jakarta: BPHN, 2008, halaman. 118. Lihat juga Badan Legislasi DPR RI, Evaluasi Program Legislasi Nasional, RUU Prioritas Tahun 2008, dan Rencana Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2009, naskah diproses oleh Pusat Studi dan Kebijakan (PSHK) Indonesia dan ditampilkan di [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net), diakses pada pukul 13.15 Wib 19 Februari 2018

Deni K yusup, Proses legislasi UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <http://dkyusup.blogspot.co.id/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html>, diunduh pada pukul 01.45 Wib tanggal 20 Februari 2018

Diakses dari Kemitraan Partnership Kebijakan Otonomi Khusus Papua, Kemitraan, Jakarta, 2008, halaman: 12, diakses pada pukul 13.15 Wib tanggal 15 Februari 2018

ELSAM, Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Policy Brief, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, halaman. 1-4. Dapat diunduh melalui [hp://referensi.elsam.or.id/2014/09/mendorongpembentukan-kembali-uu-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi/](http://referensi.elsam.or.id/2014/09/mendorongpembentukan-kembali-uu-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi/), diakses pada pukul 21.16 Wib tanggal 19 Februari 2018

Endra Yudha, Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum, <http://feelinbali.blogspot.co.id/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017

[Http://nasional.kompas.com/read/2012/07/03/04083978/Menakar.Otonomi.Khusus.Aceh.dan.Papua](http://nasional.kompas.com/read/2012/07/03/04083978/Menakar.Otonomi.Khusus.Aceh.dan.Papua), "*Otonomi Khusus Aceh dan Papua*", Diakses pada 4 Pukul 23.00 WIB tanggal 12 Februari 2018

Kaboes. [blg.com/2012/06/16/pelaksanaan-otonomi-daerah-dan-permasalahannya/](http://blg.com/2012/06/16/pelaksanaan-otonomi-daerah-dan-permasalahannya/), "*Pelaksanaan Otonomi Daerah*", Diakses pada 28 Oktober 2017

Zaki Ulya, Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2014, hal. 372 diakses pada pukul 21.00 Wib tanggal 20 Februari 2018